

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : 11
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 6 Juli 2020
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Acara : Membahas *Progress Report* mengenai Program Strategis Kementerian dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 44 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Edhy Prabowo, M.M., M.B.A. (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan)
4. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
6. Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);

8. Dr. TB. Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
9. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan); dan
10. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
11. Farida Mokodompit, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Persero);
12. M. Yana Aditya, Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero);
13. Budi Sasongko, Direktur Utama PT Garam (Persero); dan (hadir secara virtual);
14. Arief Haendra, Direktur Pengembangan PT Garam (Persero).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, membahas *Progress Report* mengenai Program Strategis Kementerian dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan percepatan realisasi APBN tahun 2020 guna pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan padat karya dan bantuan sosial yang secara nyata negara hadir di tengah-tengah masyarakat akibat Pandemi COVID-19, seperti kegiatan Gemarikan, Bulan Bakti Mutu Karantina, Bakti Nelayan, Pelatihan Masyarakat, Pendidikan Vokasi, Bantuan Benih Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan, Asuransi Usaha Budi Daya, Klaster Budi Daya Udang, Mesin dan Bahan Baku Pakan, Rumput Laut, Bioflok, Minapadi, PITAP, Ikan Hias, KJA Lobster, Maggot, *Cold Storage*, Rehabilitasi Mangrove, Kelompok Penggerak Konservasi, Pugar, Desa Wisata Bahari, dan Kelompok Masyarakat Pengawas serta penyaluran BLU-LPUMKP guna membantu memulihkan ekonomi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, yaitu nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan semua program dan kegiatan yang belum selesai pelaksanaannya di tahun-tahun sebelumnya, seperti MIAMARI di Morotai, PIAMARI di Pangandaran, serta pengadaan bantuan kapal dan alat penangkapan ikan (API). Apabila pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selesai, agar laporannya dapat disampaikan kepada Komisi IV DPR RI.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan semua prosedur perizinan ekspor benih bening lobster dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, agar ke depan tidak timbul permasalahan. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib berkomitmen dalam melaksanakan pengawasan kegiatan budi daya lobster dan pelepasliaran hasil budi daya lobster ke habitatnya serta pengawasan sumber daya kelautan perikanan agar tetap lestari.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyediakan fasilitas Kantor Pelayanan Pembiayaan/Permodalan Pinjaman BLU-LPMUKP dan Kantor Konsultasi Program Asuransi Nelayan di seluruh TPI atau PPI di Indonesia.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.25 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Dr. Edhy Prabowo, M.M., M.B.A.

Komisi IV DPR RI

Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151